

**KELEMAHAN SISTEM EKONOMI KAPITALISME DAN
SOSIALISME MENURUT MUHAMMAD SHARIF CHAUDHRY
DALAM KARYANYA *FUNDAMENTAL OF ISLAMIC ECONOMIC
SYSTEM*.**

Hoirul Amri

(Dosen FAI Universitas Muhammadiyah Palembang)

Email : hoirulamri@yahoo.com

ABSTRAK

“Studi ini membahas tentang kelemahan sistem ekonomi Kapitalisme dan Sosialisme Menurut Muhammad Sharif Chaudhry dalam karyanya Fundamental of Islamic Economic System. Hasil studi ini menjelaskan bahwa kelemahan ekonomi Kapitalisme menurut Muhammad Sharif Chaudhry terlihat jelas pada hak milik yang disandarkan kepada individu atas swasta; kebebasan ekonomi tanpa campur tangan negara; monopoli dan bunga sebagai orientasi ekonomi, akibatnya menghasilkan eksploitasi dan ketidakmeratanya distribusi kekayaan yang pada gilirannya menghasilkan konflik dan perjuangan kelas. Sementara kelemahan ekonomi Sosialisme dapat dilihat dari pemilikan yang berpusat pada negara. Sehingga menghasilkan individu menjadi sulit mengembangkan diri dan pengabaian hak asasi manusia terabaikan; pemujaan berlebih terhadap materialisme, memarginalkan peran agama, akibatnya moral dan nilai-nilai spiritual tidak ada; kemudian negara menghilangkan kelas borjuis dengan cara membangun kediktatoran pada kaum proletar yang berujung pada musnahnya hak-hak fundamental dan kebebasan sipil dan manusia disetel sehingga hanya berstatus sebagai binatang ekonomi semata; terakhir kesamaan ekonomi sebagai cita-cita utama hanya utopia dan kamufase belaka”.

Kata Kunci; *Muhammad Sharif Chaudhry, Kapitalisme, Sosialisme, Ekonomi Islam*

Dasar Pemikiran

Dalam dua dekade terakhir, dua ideologi ekonomi, Kapitalisme dan Sosialisme, berlomba menancapkan pengaruhnya di berbagai negara dunia. Dua ideologi ini bersaing untuk membuktikan diri sebagai ideologi yang paling benar dan paling ampuh dalam mengatasi persoalan ekonomi yang dihadapi umat manusia, masing-masing pengusung kedua ideologi ini berlomba mengemukakan argumen bahwa ideologi merekalah yang paling tangguh dan akan bertahan dalam waktu yang sangat lama.

Kuatnya dominasi ekonomi tersebut tidak lain karena buah dari politik Imperialisme dan Kolonialisme sehingga menjadikan sistem ekonomi lainnya seperti ekonomi Islam tergerus dan mulai di tinggalkan.

Ekonomi Kapitalisme dan Sosialisme sejak awal dibangun di atas filsafat kebendaan, di satu sisi memang telah memberikan kemajuan material yang luar biasa sepanjang sejarah modern. Namun di sisi lain, prestasi-prestasi itu harus dibayar mahal oleh rusaknya (spiritualitas) kemanusiaan dan lingkungan hidup. Kini juga semakin disadari bahwa capaian peradaban (ekonomi) modern ternyata tidak sepenuhnya memberi kesejahteraan bagi umat manusia (Hoetoro, 2007: 212).

Pengutamaan hak-hak individu dalam kapitalisme seringkali memunculkan konflik kepentingan antar anggota masyarakat. Dalam konflik seperti ini biasanya masyarakat miskin akan dikalahkan oleh kelompok kaya yang menguasai sumber daya ekonomi lebih banyak. Tujuan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat banyak seringkali dikorbankan atau sebaliknya terkorbankan oleh kepentingan-kepentingan individu (Pangiuk, 2011: 5). Sementara pada sistem ekonomi sosialis, yang dibangun oleh komunis-sosialis Marxian mencoba untuk mengubah ketidaksamaan kekayaan dengan menghapuskan hak-hak kebebasan individu dan hak terhadap pemusatan kepemilikan yang mengakibatkan hilangnya hak dan semangat untuk bekerja lebih giat dan berkurangnya efisiensi kerja buruh (Pangiuk, 2011: 7-8).

Dengan adanya permasalahan-permasalahan di atas, ekonomi Kapitalis dan Sosialis menjadi objek kritikan hangat para ekonom dunia terutama para ekonom Islam salah satunya yang *concern* memberikan kritik kelemahan sistem tersebut adalah Muhammad Sharif Chaudhry, cendekiawan muslim dari Pakistan dalam karyanya yang berjudul *Fundamental of Islamic Economic System*.

Biografi Muhammad Sharif Chaudhry

Muhammad Sharif Chaudhry merupakan hakim agung di Pakistan. Lahir dari keluarga muslim yang taat di Hoshiarpur pada tanggal 10 Maret 1928. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Punjab di Lahore. Memulai karir di pengadilan sebagai Hakim Sipil pada tanggal 23 Maret 1953. Pada tahun 1970-1980 menjabat sebagai Hakim Sidang di Pengadilan Punjab dan sebagai hakim Pengadilan Tinggi Lahore pada

2 November 1981 dan pensiun pada 10 Maret 1990 (<https://en.wikipedia.org/wiki/> di akses tanggal 18 Desember 2016 jam 21.30 Wib).

Sharif Chaudhry terkenal sebagai hakim profesional, bersih dan jujur. Karena reputasi tersebut, pemerintah Pakistan memintanya kembali untuk bergabung sebagai hakim Pengadilan Khusus sampai tahun 1994. Dalam kesehariannya Sharif Chaudhry dikenal sebagai pribadi yang baik, senang dengan pola hidup sederhana dan sangat menyukai pemikiran-pemikiran Muhammad Iqbal salah satu tokoh besar Islam dan pendiri negara Pakistan.

Sharif Chaudhry banyak melakukan kajian terhadap berbagai bidang ilmu dan termasuk penulis produktif. Tulisan-tulisan beliau mencakup berbagai bidang baik agama, ekonomi, hukum, politik maupun hak asasi manusia. Beberapa karya-karya Sharif Chaudhry antara lain; *What is Islam* (Apa Islam), *Women's Rights in Islam* (Hak-Hak Perempuan dalam Islam), *Fundamentals of Islamic Economic System* (Dasar-dasar Sistem Ekonomi Islam), *Dynamics of Islamic Jihad* (Dinamika Jihad Islam), *Social and Moral Code of Islam* (Sosial dan moral Kode Islam), *Concept of God in Qur'an* (Konsep Allah dalam Al-Qur'an), *A Comparative Study of World Religions* (Studi Perbandingan Agama-Agama Dunia), dan *Pillars of Islam* (Rukun Islam) (<http://www.shaufi.com/> di akses tanggal 18 Desember 2016 jam 21.00 Wib).

Pada 29 Juni 2009, Sharif Chaudhry meninggal dunia, dan dimakamkan di Bahawalpur, Pakistan.

Pandangan Muhammad Sharif Chaudhry Tentang Kelemahan Sistem Ekonomi Kapitalisme dan Sosialisme

Muhammad Sharif Chaudhry memulai pembahasan tentang kelemahan ekonomi Kapitalisme dan Sosialisme dengan menyatakan bahwa Kapitalis dan Sosialis merupakan sistem ekonomi yang paling dominan di dalam dunia modern dewasa ini. Kapitalisme adalah filsafat Eropa Barat dan Amerika Utara di bawah kepemimpinan Amerika Serikat. Sedangkan Sosialisme adalah ideologi ekonomi yang paling dominan di Uni Soviet, RRC, dan beberapa negara di Eropa Timur (Chaudhry, 2016: 355).

Dengan mengutip *Collins Dictionary*, Sharif Chaudhry mendefinisikan bahwa Kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atau

swasta atas alat-alat produksi, distribusi dan pertukaran. Secara luas, di dalam sistem ekonomi Kapitalisme ini alat-alat produksi, distribusi dan pertukaran yang utama berada di tangan swasta (pribadi maupun perusahaan). Dengan ciri-ciri utamanya antara lain; kepemilikan alat produksi; pertukaran dan distribusi yang tak terlarang; kebebasan ekonomi; laba sebagai pendorong kegiatan produksi; kebebasan pasar dan persaingan; keabsahan monopoli; perbankan dan keberadaan bunga; disparitas yang lebar dalam distribusi kekayaan; eksploitasi ekonomi oleh yang kuat terhadap yang lemah, dan sebagainya (Chaudhry, 2016: 355-356).

Kapitalisme didefinisikan juga sebagai sistem ekonomi yang dikuasai dan diwarnai oleh peranan modal (kapital) yang didasarkan pada tiga gagasan utama; kepemilikan individu; persaingan usaha (ekonomi ditentukan oleh mekanisme pasar); dan rasionalitas; baik rasio instrumental (teknologi untuk industrialisasi), rasio hukum, maupun ilmiah) (Kamil, 2016: 22).

Sedangkan Sosialisme, secara bahasa berasal dari kata sosial yang berarti masyarakat, lawan dari kata individu. Sosialisme dikembangkan oleh penggagasnya, Karl Marx (1818-1883) sebagai antitesis dari Kapitalisme (Kamil, 2016: 24). Sosialisme merupakan produk dari revolusi Prancis dan revolusi Industri di Inggris pada akhir abad ke-18 dan akhir abad ke-19. Prinsip utama Sosialisme bahwa produksi bukan semata-mata dipusatkan di tangan negara, tetapi peranan negara harus seluruhnya merupakan peranan ekonomi (Yuliadi, 2001: 82-83).

Secara istilah Sosialisme merupakan sistem atau teori ekonomi, di mana alat produksi, distribusi dan pertukaran dimiliki oleh masyarakat secara kolektif melalui negara. Sosialisme diartikan juga suatu tahapan perkembangan masyarakat dari Kapitalisme ke Komunisme, dan memiliki ciri khusus distribusi pendapatan sesuai dengan kerja, bukan dengan kebutuhan. Dengan ciri utama antara lain; kepemilikan semua alat produksi, distribusi dan pertukaran oleh publik atau negara dan peniadaan kepemilikan pribadi atau swasta; persamaan ekonomi dan pemberian kebutuhan hidup dasar bagi semua warga negara; materialisme dengan titik berat pada faktor-faktor ekonomi; negara totalitarian dan diktator proletariat; penindasan kebebasan sipil dan sebagainya (Chaudhry, 2016: 362-363).

Sistem ekonomi Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang menjadikan akumulasi dan ekspansi modal sebanyak dan seluas mungkin tanpa batas dan akhir sebagai tujuan. Karenanya, sistem ini melahirkan eksploitasi dan alienasi manusia. Bahkan, terbukti tidak berpijak pada fondasi yang benar, di mana komitmennya pada moral dan kemanusiaan sangat lemah (Kamil, 2016: 16).

Menurut Muhammad Sharif Chaudhry kelemahan ekonomi Kapitalisme dapat dilihat dari berbagai sisi antara lain; *Pertama*, dari sisi hak milik. Ekonomi Kapitalis menyandarkan hak pemilikan oleh swasta merupakan tanda utama Kapitalisme. Dalam arti, sistem ini mempercayai swasta atas alat produksi, distribusi dan pertukaran yang dikelola dan dikendalikan oleh individu atau sekelompok individu, dengan tujuan mendapat laba. Konsep seperti ini, dapat mengarah kepada konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang. Hal ini akan mengganggu keseimbangan distribusi kekayaan dan pendapat di dalam masyarakat. Disparitas ekonomi dan celah yang selalu melebar antara si kaya dan si miskin akan menabur benih perselisihan dan akhirnya kehancuran masyarakat Kapitalis.

Kedua, dari sisi kebebasan ekonomi. Ekonomi Kapitalisme menempatkan kebebasan ekonomi yang tak terbatas dan tiadanya campur tangan negara. Kebebasan ekonomi tanpa batas seperti ini menimbulkan pikiran untuk mendapatkan harta dengan cara curang seperti judi dan pelacuran. Konsekuensinya kekayaan dimiliki oleh sebagian kecil individu, mereka akan menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri dan akan mengorbankan kepentingan masyarakat semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu (Rozalinda, 2014: 28).

Lebih lanjut, demi keuntungan dapat menimbulkan malpraktik bisnis seperti penyelundupan, pasar gelap, pencarian laba berlebihan, penimbunan, spekulasi, transaksi *forward*, penipuan, penindasan atau eksploitasi, pemalsuan, dan sebagainya. Akhirnya, terjadi lomba gila (*mad-race*) untuk memperoleh harta menjadi aturan hidup sehari-hari dan nilai sosial dan moral tinggi seperti persaudaraan, saling tolong-menolong, cinta, kemurahan dan amanah berganti menjadi mementingkan diri sendiri, tak berperasaan, kebencian, kebohongan dan saling tidak percaya (Chaudhry, 2016: 357-358).

Ketiga, dari sisi monopoli. Kapitalisme sangat memuja persaingan. Maka, dengan pengakuan atas keberadaan monopoli akan mendorong terjadi merger beberapa bisnis kecil menjadi satu sehingga menjadi monopoli atau kartel. Konsekuensinya, monopoli membunuh persaingan bebas, menyebabkan inflasi dan akhirnya menyebabkan terjadinya pengangguran. Lebih dari itu, siklus perdagangan (*business cycle*), produksi yang tak terencana, persaingan yang berlebihan, dan akumulasi modal yang terus meningkat akan merusak keseimbangan antara produksi dan konsumsi, dan hal akan berujung pada terjadinya depresi ekonomi (Chaudhry, 2016: 358-359).

Keempat, dari sisi bunga. Lembaga perbankan dan bunga adalah darah kehidupan Kapitalisme. Praktek perbankan adalah menggunakan basis bunga (*interest based*). Dimana salah satu pihak (nasabah), bertindak sebagai peminjam dan pihak yang lainnya (bank) bertindak sebagai pemberi pinjaman. Atas dasar pinjaman tersebut, nasabah dikenakan bunga sebagai kompensasi dari pertanggung jawaban waktu pembayaran hutang tersebut, dengan tidak memperdulikan, apakah usaha nasabah mengalami keuntungan ataupun tidak. Praktek seperti ini jelas merupakan ketidakadilan, karena merugikan dan bertindak dhalim terhadap salah satu pihak dan serta merta menguntungkan pihak lainnya.

Kelima, dari sisi eksploitasi. Konsep hak tak terbatas dalam kebebasan ekonomi dan hak pemilikan oleh individu maupun swasta yang tak terkontrol telah secara praktis menimbulkan eksploitasi atau penindasan. Sehingga seolah menjadi pemandangan umum melihat penindasan yang dilakukan si kuat terhadap si lemah, seperti pekerja ditindas majikan, petani diperas tuan tanah, si miskin dieksploitasi si kaya, pembantu ditindas majikan, rakyat ditindas penguasa, dan di atas itu semua keuangan negara dieksploitasi oleh pemegang kekuasaan (Chaudhry, 2016: 360).

Keenam, dari sisi distribusi kekayaan. Dengan paham kebebasan ekonomi dan pemilikan alat-alat produksi oleh individu atau swasta, maka otomatis disparitas ekonomi akan muncul. Perbedaan hak yang sangat mencolok antara majikan dan pekerja akan menyebabkan masyarakat terbelah menjadi dua kelompok yang bersaing dan mempunyai kepentingan saling menjatuhkan satu dengan lainnya. Penerima upah tidak menikmati kesempatan yang sama dengan pemberi upah untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, ketrampilan teknik yang sempurna, dan pekerjaan yang

baik (Abdullah, 2010: 352). Keseimbangan distribusi ekonomi yang rusak dan celah yang dalam antara si kaya dan si miskin, pada akhirnya akan mengarah pada pertentangan sosial antar kelas dan kehancuran sistem itu sendiri (Chaudhry, 2016: 361).

Selanjutnya, konsep kapitalisme cenderung memahami bahwa pertumbuhan ekonomi lebih harus diperhatikan daripada pemerataan ekonomi, karena pemerataan akan timbul setelah adanya pertumbuhan ekonomi (*trickle down effect*). Kebijakan ini merupakan dampak dari mekanisme modal yang cenderung berputar pada kalangan penguasa. Bila penguasa mendapatkan keuntungan maka secara tidak langsung akan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini menjadikan kesejahteraan masyarakat terabaikan dan diabaikan (Sudarsono, 2007: 98).

Tidak berbeda dengan sistem ekonomi Kapitalisme, pada sistem sistem ekonomi Sosialisme kelemahannya dapat dilihat dari sisi berikut ini; *Pertama*, dari sisi kepemilikan. Sistem ekonomi Sosialisme meletakkan kepemilikan negara atas semua kekayaan dan alat produksi, menyebabkan manajemen seluruh alat produksi itu ada di tangan birokrasi. Perjalanan mesin ekonomi yang berlangsung secara birokratik akan berakibat pada terjadinya inefisiensi, produksi rendah, dan akhirnya meruntuhkan sistem itu sendiri. Selain itu, individu menjadi sulit mengembangkan diri karena senantiasa dikontrol oleh negara, bahkan atas nama kepentingan bersama hak asasi manusia sering kali terabaikan (Chaudhry, 2016: 364).

Apalagi tawar-menawar sangat sulit dilakukan oleh individu yang terpaksa mengorbankan kebebasan pribadinya dan hak terhadap hak milik pribadi. Tentu saja hal tersebut akan menjadi bibit konflik yang tak tertahankan dalam bentuk rasa dendam dan permusuhan (Rozalinda, 2014: 30). Maka otomatis dengan doktrin tersebut Sosialisme bersikap ambivalen terhadap peran individu versus negara. Di satu sisi, visi Marxis secara jelas melarang menempatkan negara berhadapan dengan individu, dan mengembangkan keadaan yang terus memburuk sebagai keharusan logis dari dialektikanya, penaklukan kehendak bebas individu dalam skema historis ini mempertegas, dengan suatu model deterministik, kontrol oleh tangan-tangan negara. Akibatnya, Sosialisme sejalan dengan sebuah negara monopolistik dan anarkis (Abdullah, 2010: 356).

Di sisi lain, tiadanya penghargaan terhadap kreativitas individu menimbulkan sikap apatisme dan kehilangan semangat hidup. Pemegang birokrasi menjadi tumpuan bagi para pelaku ekonomi sehingga mendorong praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) untuk memudahkan mendapatkan fasilitas negara. Maka tidak mengherankan jika praktek KKN sangat menonjol pada negara yang menganut sistem sentralistik (Yuliadi, 2001: 84).

Kedua, dari sisi materialisme. Sosialisme dengan alat analisis Marx tidak percaya kepada agama. Karena tahap kemajuan manusia ditentukan melulu oleh setiap pengaruh antara kekuatan-kekuatan ekonomi yang bertentangan, sehingga peran Tuhan tidak ada sama sekali. Konsep ini lahir dari keyakinan Sosialisme bahwa agama ikut melegitimasi eksploitasi kaum borjuis terhadap kaum proletar lewat konsep akhirnya yang membuat manusia melupakan dunia, agama juga memandang kemiskinan sebagai kebaikan, dan Tuhan, hanyalah ciptaan khayalan manusia semata (Kamil, 2016: 39).

Ketiga, dari sisi regimentasi dan totalitarianisme. Komunisme bentuk baru dari Sosialisme mencita-citakan sebuah negara *totalitarianisme*. Di dalam negara seperti ini, kelas borjuis ditiadakan dan kediktatoran yang kuat oleh kaum proletar dibangun. Hak-hak fundamental dan kebebasan sipil dimusnakan dan manusia disetel sehingga hanya berstatus sebagai binatang ekonomi semata yang bertugas sebagai mesin produksi untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat (Chaudhry, 2016: 365, Yuliadi, 2001: 83).

Keempat, dari sisi kesamaan ekonomi. Dalam bentuk teori, Sosialisme mengklaim bertujuan untuk kesamaan ekonomi, walaupun tidak pernah teralisasi. Bahkan atas nama kesamaan ekonomi meniscayakan adanya pemerintahan diktator, atau jika perlu totaliter (Chaudhry, 2016: 366, Kamil, 2016: 39).

Dari argumentasi di atas terbukti bahwa Sosialisme tidak mampu membawa masyarakat pada kemajuan ekonomi. Sosialisme meniscayakan pemusatan kekuasaan di tangan Diktator Proletariat. Karnanya, membuat kaum miskin mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses ekonomi yang memadai. Sistem ekonomi ini juga meniscayakan ateisme dan tidak mengakui hak individu yang mengakibatkan sistem ini tidak melahirkan dinamika (Kamil, 2016: 23).

Melihat berbagai kelemahan sistem ekonomi Kapitalisme dan Sosialisme di atas, Muhammad Sharif Chaudhry memberikan solusi. Menurutnya, solusi atas berbagai

kelemahan tersebut hanya dapat ditemukan pada ekonomi Islam. Karena ekonomi Islam memiliki ciri khas antara lain;

Pertama, keharusan keadilan dan kejujuran di lapangan ekonomi (QS. an-Nisa' [4]: 32, Al-An'am [6]: 165, An-Nahl [16]: 71, Al-Isra [17]: 30, dan Az-Zukhruf [43]: 32).

Kedua, Allah adalah maha pemberi (QS. Huud [11]: 6, Al-Isra' [17]: 30, Al-Ankabut [29]: 60, Al-Ankabut [29]: 62, Al-Fathir [35]: 3, Al-Waqi'ah [56]: 63-64, Al-Mulk [67]: 21, An-Najm [53]: 39-40, dan Al-Jumu'ah [62]: 10).

Ketiga, Islam mengakui adanya campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi demi menjamin kesejahteraan warganya. Negara adalah institusi yang sangat diperlukan dalam memfungsikan kewajiban-kewajiban sosial dalam tatanan masyarakat. Negara dan agama adalah pilar-pilar kehidupan bermasyarakat yang tidak dapat dipisahkan, di mana agama berfungsi sebagai fondasinya sementara negara, memainkan peran sebagai pelopor dan pelindung. Sehingga jika salah satu pilar tersebut lemah, maka masyarakat pun akan rusak (Hoetoro, 2007: 78).

Keempat, Penghapusan bunga (QS. Al-Baqarah [2]: 275-276, Al-Baqarah [2]: 278-279, dan Ali Imran [3]: 130). Penghapusan bunga sangat penting karena bunga termasuk kategori riba. Riba tidak hanya merupakan sesuatu yang tidak bermoral akan tetapi sesuatu yang menghambat aktivitas perekonomian masyarakat, sehingga orang kaya akan semakin kaya sedangkan orang miskin akan semakin miskin dan tertindas.

Kelima, Pelembagaan sedekah dan zakat (QS. Al-Baqarah [2]: 43, Al-Baqarah [2]: 195, Al-Baqarah [2]: 215, Al-Baqarah [2]: 245, Al-Baqarah [2]: 254, Ali Imran [3]: 92, Adz-Dzariyat [51]: 19, dan Al-Hadid [57]: 18).

Keenam, Konsep halal dan haram. Mengetahui halal dan haram bagi seorang muslim merupakan suatu keharusan agar tidak terjatuh pada harta haram. Daging yang tumbuh dari harta haram akan mendapatkan bagian siksa di Neraka dan berpengaruh terhadap tingkat kecenderungan untuk melakukan kemaksiatan serta merasa enggan atau merasa malas untuk beribadah kepada Allah SWT (QS. Al-Baqarah [2]: 168, Al-Baqarah [2]: 172-173, Al-Baqarah [2]: 188, al-Maidah [5]: 88, al-Mu'minin [23]: 51, an-Nahl [16]: 116, dan al-A'raf [7]: 32-33)

Ketujuh, Distribusi kekayaan yang merata, dilarangnya penimbunan (QS. Ali Imran [3]: 180, At-Taubah [9]: 34-35, dan Al-Hasyr [59]: 7), dan menekankan pentingnya

sirkulasi kekayaan, konsen dengan kesejahteraan kaum miskin serta menjauhi sikap kerahiban dan materialisme (QS. Al-Maidah [5]: 87, Al-Hadid [57]: 27, Al-Baqarah [2]: 200, Yunus [10]: 7-8, Hud [11]: 15-16, Al-Isra' [17]: 18, At-Takasur [102]: 2, dan Al-Humazah [104]: 1-6) (Chaudhry, 2016: 1-28)

Tinjauan Kritis dan Kritik Konstruktif

Dari gambaran di atas dapat dipahami bahwa sebagai seorang ahli dan praktisi hukum dan dapat mengulas teori-teori ekonomi sampai mengkritisnya, maka apa yang dilakukan Muhammad Sharif Chaudhry patut diapresiasi karena perbuatan tersebut tidaklah mudah. Akan tetapi, jika melihat lintasan sejarah pemikiran Islam, apa yang dilakukan Muhammad Sharif Chaudhry bukanlah sesuatu yang baru, karena ulama-ulama terdahulu seperti al-Ghazali, Ibn Khaldun, al-Mawardi, Abu Yusuf dan masih banyak lagi, merupakan ulama-ulama yang menguasai berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu ekonomi.

Setidaknya ada lima alasan menolak sistem ekonomi Kapitalis dan Sosialis sebagaimana dinyatakan Muhammad Sharif Chaudhry, *Pertama*, teori ekonomi Kapitalisme dan Sosialisme telah menimbulkan ketidakadilan ekonomi yang sangat dalam. *Kedua*, teori ekonomi Kapitalisme dan Sosialisme tidak mampu mengentaskan masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Karena Ekonomi kapitalisme, misalnya yang berpatokan pada mekanisme pasar bebas dengan tangan tak kentarnya (*invisible hand*), memberikan kebebasan pada setiap orang dalam menguasai sumber daya. Dalam mengatur perekonomian, terbukti menimbulkan kesenjangan karena modal yang akhirnya menjadi penentu keberhasilan. Masyarakat seolah terbelah menjadi dua, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin papa. Itulah potret perekonomian yang tampak saat ini dengan kemiskinan dimana-mana. Sedangkan pada sistem ekonomi Sosialisme yang dipusatkan pada negara, sehingga menghilangkan kreativitas dan semangat hidup tiap individu. Di tambah lagi, dalam sistem ini semua kegiatan diambil alih untuk mencapai tujuan ekonomi, sementara pendidikan moral individu diabaikan. Akibatnya, masyarakat akan terbagi pada beberapa kelompok (buruh dan majikan). Seluruh kekuasaan akan berada di tangan buruh (*proletariat*) yang kurang berpendidikan (Rozalinda, 2014: 30).

Ketiga, paradigmanya tidak mengacu kepada kepentingan masyarakat secara menyeluruh, sehingga terlihat jelas ada dikotomi antara individu, masyarakat dan negara. Dikotomi tersebut seringkali berimbas pada konflik-konflik yang berkepanjangan. Hal ini bisa dilihat dari pemahaman mereka terhadap keadilan. Menurut konsep kapitalisme klasik yang dimaksud dengan 'adil' adalah *you get what you deserved* artinya 'anda mendapatkan apa yang telah anda usahakan'. Sedangkan menurut kelompok Sosialisme klasik menterjemahkan makna 'adil' yaitu *no one has privilege to get more than others* artinya tidak ada orang yang mendapatkan fasilitas untuk memperoleh lebih dari yang lain dengan kata lain bahwa setiap orang mendapat sama rata (Yuliadi, 2001: 30-31). Pemahaman seperti ini jelas akan berimplikasi kepada ketidakadilan itu sendiri.

Keempat, teori ekonominya tidak mampu menyelaraskan hubungan antara negara-negara di dunia, terutama antara negara-negara maju dan negara berkembang. *Kelima*, terlalaikannya pelestarian sumber daya alam karena fokus lebih kepada eksploitasi untuk kepentingan individu atau negara, dan menihilkan pemeliharaan dan pengembangannya. *Keenam*, penafian nilai-nilai moral sosial dan agama dalam praktek kehidupan dan ekonomi, berakibat muncul polarisasi di tengah-tengah masyarakat. Budaya potong kompas, korupsi dan kolusi menjadi bagian dalam kegiatan bisnis (Yuliadi, 2001: 72)

Kritik yang dilakukan Muhammad Sharif Chaudhry pada dasarnya melanjutkan jejak-jejak yang telah terlebih dahulu dilakukan oleh ekonom-ekonom Islam kontemporer lainnya, seperti Baqir al-Shadr, Muhammad Abdul Mannan, Umer Chapra, Monzer Kahf, Muhammad Nejatullah Siddiqi, dan Syed Nawab Haidar Naqvi. Bagi al-Shadr misalnya, menyatakan bahwa sistem Kapitalisme justru mendorong terbentuknya industri korporasi (perekonomian didominasi oleh sebagian kecil orang saja), melegalkan monopoli dan sangat mendewakan modal dengan penghargaan yang berlebihan (Karim, 2012: 36).

Menurut Muhammad Abdul Mannan (1980: 64) ideologi Komunisme, Sosialisme, Kapitalisme maupun Fasisme cenderung lebih menekankan aspek solidaritas individual dan menihilkan nilai-nilai ketuhanan di dalamnya. Umer Chapra menyatakan bahwa Kapitalisme menempatkan kepentingan pribadi atas kepentingan sosial dan

mengesampingkan nilai dan moralitas. Tidak heran bila paham ini memunculkan materialisme (Su'adi, 2012: 6). Sedangkan sistem sosialis tidak mampu mendorong semua individu untuk memberikan upaya terbaiknya karena semua tersentralisir dan dikendalikan oleh pemerintah dan memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya (Su'aidi, 2012: 6, Arwani, 2012: 133). Umer Chapra sampai pada kesimpulan bahwa sistem Kapitalis dan Sosialis tidak dapat berperan sebagai model bagi negara-negara Muslim karena hanya menguntungkan satu pihak saja (Chapra, 2000: 374, Rozalinda, 2016: 387).

Menilik dari kegagalan sistem Kapitalis sekuler dan Sosialis, Chapra menegaskan, kewajiban negara Islam dalam mewujudkan negara sejahtera adalah menciptakan standar hidup yang layak bagi rakyatnya dan membantu mereka yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun, konsepsi Islam dalam pemerataan pendapatan dan distribusi kekayaan tidak menyamaratakan kepemilikan bagi semua orang, tetapi mengakui perbedaan yang dibatasi oleh hak-hak kaum miskin dengan zakat untuk mewujudkan keadilan. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, maka negara memerlukan adanya sumber-sumber penghasilan. Sumber-sumber tersebut antara lain: zakat, penghasilan dari sumber alam, pemungutan pajak dan pinjaman (Inayati, 2013: 13).

Pendapat serupa juga dikemukakan Syed Nawab Haidar Naqvi. Menurutnya nilai dasar ekonomi kapitalis tersebut didasarkan pada pandangan Adam Smith terutama dalam bukunya *The Wealth of Nation* yang menekankan pada sistem ekonomi pasar, sering disebut juga ekonomi liberal, yang ditandai oleh berkuasanya kapital sehingga tidak terdapat gagasan orisinal tentang keadilan sosial dan tidak adanya persaudaraan sehingga membawa pada sifat *individualisme* dan *utilitarianisme*.

Nilai dasar ekonomi Sosialis didasarkan pada konsep sosialisme Karl Marx-sebagai antithesis dari konsep Kapitalisme – yang menyatakan bahwa produksi yang berlebihan (*over production*), tingkat konsumsi yang rendah (*under consumption*), disproporsi, eksploitasi, dan aliansi yang dialami kaum buruh dapat menciptakan suatu kondisi yang memaksa terjadinya revolusi sosial untuk menumbangkan kapitalis. Karena itu, diperlukan pengaturan oleh kepemimpinan diktator yang mewakili kaum proletar, produksi dan distribusi diatur oleh negara, pendapatan kolektif merupakan norma

utama, sedangkan relasi ekonomi dalam transaksi secara individual sangat dibatasi. Nilai dasar ekonomi sosialis yang membatasi kepemilikan pribadi yang sangat ketat dapat melanggar hak asasi manusia dan menghalangi terjadinya kreativitas dan produktivitas yang sehat (Naqvi, 1994: 71-75).

Dan terakhir, dalam konsepsi Islam kesejahteraan tidak dinilai dari terpenuhinya materi saja (sebagaimana cita-cita ekonomi Kapitalisme dan Sosialisme) tapi juga spiritual (dunia dan akhirat), terpeliharanya nilai-nilai moral dan terujudnya keharmonisan sosial. Karena itu, suatu masyarakat dikatakan sejahtera jika terpenuhi kebutuhan pokok individu rakyat, baik berupa pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatannya. Serta terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal dan kehormatan. Oleh karena itu, sistem ekonomi yang berkeadilan sangat terkait dengan sistem hukum, politik, sosial dan budaya. Konsep kesejahteraan seperti ini tidak terdapat pada sistem ekonomi Kapitalis maupun Sosialis, walaupun ada beberapa negara-negara Muslim masih setia menerapkannya seperti . Indonesia, Irak, Syria. Aljazair dan Yaman Selatan.

Maka sistem seperti ini hanya dapat ditemukan pada ekonomi Islam, sama dengan solusi yang ditawarkan Muhammad Sharif Chaudhry. Karena Islam telah membangun ekonomi agar sampai kepada *falah* dan menghasilkan *maslahah*. Untuk itu, ekonomi Islam bukan lahir sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri melainkan bagian integral dari agama Islam. Ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan (Aravik, 2016: 1).

Sistem ekonomi Kapitalisme nyata-nyata dibangun dari sebuah pandangan atau ide sekularisme yaitu pemisahan kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan agama (*fashlu al-din 'ani al-hayat*). Paham ini intinya memandang bahwa manusia hidup di dunia ini bebas untuk mengatur kehidupannya dan tidak boleh dicampuri oleh agama. Karena nilai-nilai agama terabaikan, maka sudah pasti nilai moral dan spiritual yang menjadi basis dari agama juga ditiadakan. Sehingga mustahil mendapatkan kesejahteraan hakiki dengan model seperti itu. Konsep yang sama juga ditemukan dalam ekonomi Sosialisme dengan ideologi Marxis yang menghujat agama sebagai candu, semakin menihilkan peran agama dalam kehidupan ekonomi, dan sudah pasti akan berakhir sama dengan ekonomi Kapitalisme.

Penutup

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi Kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atau swasta atas alat-alat produksi, distribusi dan pertukaran. Sedangkan sistem ekonomi Sosialisme adalah sistem atau teori ekonomi, di mana alat produksi, distribusi dan pertukaran dimiliki oleh masyarakat secara kolektif melalui negara. Kedua sistem ini merupakan sistem ekonomi yang paling dominan, bahkan merajai di dalam dunia modern dewasa ini.

Kelemahan ekonomi Kapitalisme menurut Muhammad Sharif Chaudhry terlihat jelas pada hak milik yang disandarkan kepada individu atau swasta; kebebasan ekonomi tanpa campur tangan negara; monopoli dan bunga sebagai orientasi ekonomi, akibatnya menghasilkan eksploitasi dan ketidakmeratanya distribusi kekayaan yang pada gilirannya menghasilkan konflik dan perjuangan kelas. Sementara kelemahan ekonomi Sosialisme dapat dilihat dari kepemilikan yang berpusat pada negara. Sehingga menghasilkan individu menjadi sulit mengembangkan diri dan pengabaian hak asasi manusia terabaikan; pemujaan berlebih terhadap materialisme, memarginalkan peran agama, akibatnya moral dan nilai-nilai spiritual tidak ada; kemudian negara menghilangkan kelas borjuis dengan cara membangun kediktatoran pada kaum proletar yang berujung pada musnahnya hak-hak fundamental dan kebebasan sipil dan manusia disetel sehingga hanya berstatus sebagai binatang ekonomi semata; terakhir kesamaan ekonomi sebagai cita-cita utama hanya *utopia* dan *kamuflase* belaka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Boedi, 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Aravik, Havis, 2016, *Ekonomi Islam; Konsep, Teori, dan Aplikasi, serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai al-Maududi*, Malang: Empat Dua.
- Chapra, M. Umer, 2000, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Chaudhry, Muhammad Sharif, 2016, *Fundamental of Islamic Economic System*, Terj. Suherman Rosyidi, *Sistem Ekonomi Islam; Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hoetoro, Arif, 2007, *Ekonomi Islam; Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*, Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Brawijaya.
- Kamil, Sukron, 2016, *Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan Konteks Keindonesiaan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarmanto A, 2012. *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Mannan, Muhammad Abdul, 1980. *Islamic Economics, Theory and Practice*, India: Idarah Adabiyah.
- Naqvi, Syed Nawab Haidar, 1994. *Islam, Economics and Society*, New York: Kegan Paul International Ltd.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta kerjasama dengan Bank Indonesia, 2012. *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rozalinda, 2014, *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: . Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, Heri, 2007, *Konsep Ekonomi Islam; Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Yuliadi, Imamudin, 2001. *Ekonomi Islam; Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI).
- Zamzam, Fakhry dan Havis Aravik, *Manajemen SDM Berbasis Syariah*, Bogor: CV. RWTC Success

Jurnal

- Arwani, Agus, 2012. "Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)", dalam *Jurnal Religia*, Vol. 15 No. 1, April 2012.

Inayati, Anindya Aryu, 2013, “Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra”, dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Vo. 2 No. 1, Desember 2013.

Pangiuk, Ambok, 2011. “Kepemilikan Ekonomi Kapitalis dan Sosial; Konsep Tauhid dalam Sistem Islam”, dalam *Jurnal Nalar Fiqh; Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan*, Vol. 4, Nomor 2, Desember 2011.

Su’aidi, Mohammad Zaki, 2012. “Pemikiran M. Umer Chapra Tentang Masa Depan Ekonomi Islam” dalam *Jurnal Ishraqi*, Vol. 10, No. 1, Juni 2012.

Internet

<http://www.shaufi.com/> di akses tanggal 18 Desember 2016 jam 21.00 Wib.

<https://en.wikipedia.org/wiki/> di akses tanggal 18 Desember 2016 jam 21.30 Wib.